



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## PERCEPATAN PEMBANGUNAN AKSES STASIUN KERETA CEPAT KARAWANG

**Fitria Melinda**

Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[fitria.melinda@dpr.go.id](mailto:fitria.melinda@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Peningkatan konektivitas menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang menjadi bagian dari strategi optimalisasi jaringan transportasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Konektivitas menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang yang direncanakan untuk dibangun terdiri dari delapan titik akses. Tiga titik akses di antaranya berada di kawasan Sungai Cibeet meliputi Jembatan Cibeet, jalan kawasan di sisi Kabupaten Bekasi, dan jalan kawasan di sisi Kabupaten Karawang. Selaras dengan penyelesaian akses Stasiun Kereta Cepat Karawang yang ditargetkan pada bulan Juli 2025, pemerintah mendorong percepatan pembangunan akses jalan dan jembatan melalui Sungai Cibeet dapat terbangun dalam waktu dekat. Saat ini, progres konstruksi Jembatan Cibeet yang dilakukan oleh PT Deltamas telah mencapai 36 persen, sementara pembangunan jalan kawasan telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Karawang, Pemerintah Kabupaten Bekasi, serta pihak swasta yang terlibat. Selain akses dari kawasan Sungai Cibeet, jalur lain seperti Trans Heksa Karawang (THK) di sisi utara dan selatan juga masih dalam tahap pembangunan.

Sejak diresmikan pada tahun 2023, jumlah penumpang KCJB terus meningkat, dengan total mencapai 7,8 juta orang. Puncak tertinggi tercatat pada 27 Januari 2025, layanan kereta cepat melayani 24.350 penumpang dalam satu hari. Pertumbuhan ini diikuti dengan peningkatan frekuensi perjalanan dari 48 menjadi 62 perjalanan per hari, dengan Stasiun Kereta Cepat Karawang melayani 31 di antaranya. Sejak mulai beroperasi pada 24 Desember 2024, Stasiun Kereta Cepat Karawang telah melayani 20.268 penumpang, atau rata-rata 327 penumpang per hari. Keberlanjutan pengembangan infrastruktur pendukung, seperti integrasi antarmoda dan jalan akses menuju stasiun yang memadai, menjadi faktor penting dalam memastikan efisiensi operasional dan peningkatan daya tarik transportasi publik berbasis rel ini.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah membahas pembangunan akses dari *exit* tol KM 42+000 menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang, yang akan dikerjakan oleh PT Jasa Marga. Proyek ini masih menunggu kepastian, terutama aspek operasional dan skema pembiayaan, yang menjadi faktor dalam keberlanjutannya. Selain itu, perubahan rencana akibat pembangunan akses baru ini juga dapat memicu tuntutan kompensasi dari beberapa Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang terdampak. Faktor konsumen juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama terkait besaran tarif tol yang akan diberlakukan jika akses tersebut direalisasikan.

Meskipun akses menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang masih terbatas, mobilitas pengguna tetap dapat difasilitasi melalui jalur alternatif seperti Jalan Badami, Jalan Pasar Jati, dan Jalan Raya Pangkalan. Upaya integrasi transportasi terlihat dari ketersediaan layanan taksi di area *drop-off* serta *shuttle* gratis menuju pusat perbelanjaan besar bagi pemegang tiket kereta cepat. Integrasi antarmoda transportasi lainnya, seperti bus pengumpan dan angkutan umum, juga dalam tahap perencanaan untuk dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, untuk meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas penumpang, diperlukan pengembangan jalur *pedestrian* yang aman serta penyediaan fasilitas parkir yang memadai.

Akselerasi pembangunan akses ini diharapkan dapat segera menunjang berkembangnya Stasiun Kereta Cepat Karawang sebagai salah satu pemberhentian utama dalam jaringan KCJB. Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang berupaya mempercepat pembangunan ini melalui peninjauan langsung lahan dan memastikan pengadaan lahan sesuai dengan prosedur. Percepatan pembangunan tidak hanya bergantung pada faktor teknis, namun juga pada efektivitas perencanaan, kolaborasi antarlembaga, perencanaan pembiayaan, serta mitigasi potensi kendala dalam proses pelaksanaannya. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya mengutamakan fungsional jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan, dampak sosial-ekonomi serta integrasi dengan sistem transportasi lainnya. Dengan pendekatan strategis yang mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, akses menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang diharapkan dapat selesai dengan tepat waktu, memberikan manfaat yang optimal bagi mobilitas masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kenyamanan dan efisiensi perjalanan bagi pengguna KCJB.

## Atensi DPR

Percepatan pembangunan akses menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang memerlukan perhatian dari Komisi V DPR RI mengingat pentingnya infrastruktur pendukung untuk integrasi dan kelancaran operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Dengan jumlah penumpang yang semakin meningkat, aksesibilitas stasiun menjadi kebutuhan yang krusial. Komisi V DPR RI diharapkan dapat memantau akselerasi dari pembangunan ini serta memastikan kolaborasi yang dilakukan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta pihak terkait berjalan optimal. Aspek pendanaan, kebijakan tarif akses tol, serta kepastian penyelesaian proyek ini juga memerlukan pengawasan dari Komisi V DPR RI agar pembangunan dapat selesai tepat waktu. Dengan aksesibilitas stasiun yang memadai, konektivitas masyarakat diharapkan semakin optimal sehingga pengguna KCJB dapat menikmati layanan dengan lebih nyaman dan efisien. Hal tersebut juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara berkelanjutan.

## Sumber

antaranews.com, 26 Februari 2025;  
bisnis.com, 25 Februari 2025;  
cnbcindonesia.com, 26 Februari 2025;  
*Investor Daily*, 26 Februari 2025;  
kompas.com, 26 Februari 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament*  
*Evidence Based Policy Making*